



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN TRIWULAN II 2024

BIRO PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN  
DAN PENINDAKAN



[bappebti.go.id](https://bappebti.go.id)



Gedung Bappebti,  
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan telah dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, dan melaporkan hasil kerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Dalam Laporan dapat diukur beberapa indikator yaitu ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ini.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kegiatan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai pijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja pada bulan berikutnya sehingga tujuan dan sasaran Bappebti akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2024  
**Kepala Biro Peraturan Perundang-  
Undangan Dan Penindakan,**

**Aldison**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Melaksanakan tugasnya Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas.

Pada tahun 2024, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, pencapaian Indikator Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik**, sampai dengan Triwulan II tercapai 100% (seratus persen) atau tercapai sebesar 105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen) dari target tahun 2024 yaitu 95% (sembilan puluh lima persen).
2. **Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan**, sampai dengan Triwulan II tercapai sebanyak 100% (seratus persen) Lembaga dari target tahun 2024 yaitu 100% (seratus persen) atau tercapai sebesar 100% (seratus persen).
3. **Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK**, sampai dengan Triwulan II tercapai sebanyak 72,13% (enam puluh dua koma enam persen) dari target tahun 2024 yaitu 87% (delapan puluh tujuh persen) atau tercapai sebesar 82,90% (tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga persen).
4. **Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan**, sampai dengan Triwulan II tercapai sebanyak 100% (seratus persen) dari target tahun 2024 yaitu 90% (sembilan puluh persen) atau tercapai sebesar 111,11% (seratus sebelas koma sebelas persen).
5. **Persentase Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Aset Kripto**, sampai dengan Triwulan II tercapai sebanyak 92,23% (sembilan puluh dua koma dua puluh tiga persen) dari target tahun 2024 yaitu 89% (delapan puluh sembilan persen) atau tercapai sebesar 103,62% (seratus tiga koma enam puluh dua persen).

6. **Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum**, pada Triwulan II tercapai senilai 92.85 (sembilan puluh dua koma delapan puluh lima) dengan kategori "Sangat Baik" dari target tahun 2024 yaitu senilai 87 (delapan puluh tujuh) atau tercapai sebesar 106,72% (seratus enam koma tujuh puluh dua persen).

Dari capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan capaian rata-rata kinerja sebanyak 101,60% (seratus satu koma enam puluh persen), maka dari 6 (enam) indikator kinerja pada Triwulan II terdapat 5 (lima) indikator telah tercapai.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	2
C. PERAN STRATEGIS.....	2
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>3</b>
A. CAPAIAN KINERJA.....	3
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	44
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja	
2. Matriks Pengukuran Pencapaian Kinerja	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.....	3
Tabel 2.2	Capaian IKK-1 s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.3	Peraturan Bappebti s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	6
Tabel 2.4	Capaian IKK-2 s.d Triwulan II Tahun 2024 .....	9
Tabel 2.5	Perusahaan yang diundercover/identifikasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	10
Tabel 2.6	Perusahaan/Nasabah yang diperiksa s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.7	Perusahaan/Nasabah yang di Sidik s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.8	Pengenaan Sanksi terhadap Pelaku Usaha s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.9	Capaian IKK-3 s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	17
Tabel 2.10	Asistensi Hukum s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	17
Tabel 2.11	Capaian IKK-4 s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	30
Tabel 2.12	Penanganan Litigasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.13	Permintaan dan Pemenuhan Penanganan Perselisihan secara online s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	32
Tabel 2.14	Capaian IKK-5 s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	39
Tabel 2.15	Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Aset Kripto .....	40
Tabel 2.16	Kegiatan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto .....	41
Tabel 2.17	Kriteria Mutu Pelayanan .....	42
Tabel 2.18	Capaian IKK-6 s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	42
Tabel 2.19	Kegiatan Ketatausahaan s.d. Triwulan II Tahun 2024.....	43
Tabel 2.20	Realisasi Anggaran Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan s.d. Triwulan II Tahun 2024 .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi pengaturan dimaksud adalah dalam rangka membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut maka penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang dapat terlaksana secara teratur, wajar, tertib, efisien dan efektif, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring dengan pesatnya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap keterbukaan informasi, serta dalam rangka menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, maka untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, secara berkesinambungan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan melakukan penyusunan, revisi serta perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan menerbitkan peraturan-peraturan yang baru.

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan secara konsisten juga terus berupaya melakukan penegakan hukum, karena disadari salah satu faktor meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, adalah melalui penegakan hukum yang konsisten. Dalam menjaga konsistensi tersebut, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan merekomendasi pengenaan sanksi bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TUJUAN**

Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilakukan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan termasuk juga unit Eselon II. Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik, misalnya triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja. Kegiatan pemantauan kinerja di tingkatan unit kerja Eselon II dilakukan dengan menyampaikan Laporan Kegiatan triwulan.

## **C. PERAN SRATEGIS**

Seiring dengan pesatnya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap keterbukaan informasi, serta dalam rangka menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, maka untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, secara berkesinambungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan melakukan penyusunan, revisi serta perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan menerbitkan peraturan-peraturan yang baru.

Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan secara konsisten juga terus berupaya melakukan penegakan hukum karena disadari salah satu faktor meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang adalah melalui penegakan hukum yang konsisten. Dalam menjaga konsistensi tersebut, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan merekomendasi pengenaan sanksi bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2020 di lingkungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan. Indikator kinerja di lingkungan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, serta dengan mengakomodasikan keinginan *stakeholder*. Kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Kementerian Perdagangan dalam waktu tiga bulan menunjukkan hasil pengukuran yang baik terhadap target hampir di seluruh indikator kinerja yang menjadi indikator sasaran pembangunan perdagangan tahun 2024. Tabel 2.1 berikut menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**  
**s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
1.	Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	95%	100%	105,26%
2.	Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian s.d. Triwulan II Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
3.	Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	87%	72,13%	82,90%
4.	Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan	90%	100%	111,11%
5.	Persentase Hasil Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto	89%	92,23%	103,62%
6.	Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum	87	92.85	106,72%
Rata-rata capaian				101,60%

Sumber : Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.1, dapat dilihat bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan Triwulan II tercapai lebih dari 100%. Hasil pengukuran rata-rata indikator kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar **101,60% (seratus satu koma enam puluh persen)**. Adapun kilas capaian sasaran kinerja Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bappebti, Kementerian Perdagangan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **IKK-1 Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik**

Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, Bappebti setiap saat harus selalu mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut untuk kepentingan yang ada.

Untuk mengukur capaian indikator Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

(Jumlah regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang telah di uji publik/Jumlah regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang terbit di tahun berjalan) x 100%

**Tabel 2.2**  
**Capaian IKK-1 s.d. Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi s.d. Triwulan II 2024	Persentase Capaian Triwulan II (%)
Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	95%	100%	105,26%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.2, dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II. Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik tercapai sebesar 100% (seratus persen) dari target 95% (sembilan puluh lima persen) dengan persentase capaian sebesar **105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen)**. Tercapainya indikator tersebut karena terselesaikannya penyusunan 7 (tujuh) peraturan di bidang PBK, SRG dan PLK yang telah diuji publik.

Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik didukung dengan kegiatan seperti:

#### **1. Pengkajian, Penyempurnaan dan Penyusunan Peraturan PBK, SRG dan PLK**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk kepentingan penyusunan atau penyempurnaan peraturan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, terdapat **7 (tujuh) Peraturan** yang telah ditandatangani dan diundangkan dengan rincian sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

## Peraturan Bappebti s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Triwulan	Peraturan	Tentang	Keterangan
<b>Peraturan Bappebti</b>				
1.	I	Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Bursa Berjangka Dan Kontrak Berjangka Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri	Telah ditandatangani dan diundangkan
2.	I	Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto	Telah ditandatangani dan diundangkan
3.	I	Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024	Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Telah ditandatangani dan diundangkan
4.	I	Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2024	Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Telah ditandatangani dan diundangkan
5.	I	Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka	Telah ditandatangani dan diundangkan
<b>Surat Edaran</b>				

6.	I	Surat Edaran Nomor 47/BAPPEBTI /SE/03/2024	Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka	Telah ditanda tangani dan di undangkan
7.	II	Surat Edaran Nomor 64/BAPPEBTI /SE/04/2024	Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka	Telah di uji publik dan diundangkan

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Kegiatan Pengkajian sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sebanyak **17 (tujuh belas) kali**.

## 2. Uji Publik Regulasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan uji publik regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK ini dilaksanakan untuk menyempurnakan draft regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK bersama dengan internal Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Asosiasi Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, serta Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan Uji Publik Regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sebanyak **7 (tujuh) kali**.

## 3. Kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK

Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan pemahaman tentang ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan berjangka, inventarisasi permasalahan terkait dengan penerapan peraturan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 belum dilaksanakan.

Faktor pendukung pencapaian target IKK Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik, yaitu:

- Ketersediaan sumber literatur atau sumber referensi hukum yg menjadi dasar peraturan.
- Ketersediaan alokasi waktu yang memadai dari pimpinan internal Bappebti dan para pemangku kepentingan terkait.

- Peran serta masukan yang konstruktif dan relevan dari para pihak terkait bagi draft peraturan.

Dalam pelaksanaan penyusunan regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK terdapat beberapa kendala seperti:

- Bahan analisis hukum peraturan terhambat/tidak tepat waktu/kualitas tidak sesuai diharapkan, karena Sumber literatur yang dimiliki terbatas.
- Pendapat atau masukan yang disampaikan belum tepat sasaran pada substansi regulasi yang disusun, karena pihak yang menyampaikan pendapat belum memahami substansi.
- Kegiatan pertemuan teknis implementasi/diseminasi peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran, karena pihak yang hadir dalam pertemuan teknis bukanlah pihak yang diundang atau kompeten.

Tindaklanjut yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya untuk mengoptimalkan pencapaian penyusunan regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK akan dilakukan beberapa hal seperti:

- Menyertakan perintah wajib bagi pihak yang diundang untuk hadir dan disertai sanksi teguran bila melanggar.
- Membagikan materi sebelum pelaksanaan pembahasan agar peserta dapat mempelajarinya.

### **IKK-2 Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan**

Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan merupakan Indikator Kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.

2. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan.
3. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan SRG yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah.

Untuk mengukur capaian indikator Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

*(Jumlah realisasi pengenaan sanksi atau penindakan lebih lanjut/Jumlah rekomendasi hasil identifikasi, pemeriksaan teknis, pemeriksaan, dan penyidikan) x 100%*

**Tabel 2.4**  
**Capaian IKK-2 s.d. Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi s.d. Triwulan II 2024	Persentase Capaian Triwulan II (%)
Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan	100%	100%	100%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.4, dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II. Persentase Capaian Triwulan II Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan tercapai sebesar 100% (seratus persen) dari target 100% (seratus persen) dengan persentase capaian sebesar **100% (seratus persen)**. Tercapainya indikator tersebut karena realisasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha sebanyak **402 (empat ratus dua) sanksi** berdasarkan jumlah rekomendasi hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan dan hasil Pengawasan sebanyak **402 (empat ratus dua) sanksi**. Jadi, Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau

Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan sebesar **100% (seratus persen)**.

Untuk mendukung tercapainya IKK-2 Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti:

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi lain  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK sampai dengan Triwulan II tahun 2024, kegiatan Koordinasi telah dilaksanakan sebanyak **3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di Bandung, 1 (satu) kali di Semarang dan 1 (satu) kali di Yogyakarta**.
2. Gelar Kasus terhadap pelanggaran di bidang PBK, SRG, dan PLK  
Kegiatan gelar di bidang PBK, SRG dan PLK terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Gelar Kasus sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Gelar Perkara sebagai bagian dari kegiatan penyidikan di bidang PBK, SRG dan PLK. Kegiatan Gelar Kasus pada Triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak **7 (tujuh) kali**.
3. Identifikasi Pihak yang melanggar hukum di bidang PBK dan SRG  
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha PBK dan SRG sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan Identifikasi sebanyak **10 (sepuluh) kali** dengan rincian sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5**

**Perusahaan yang diundercover/identifikasi s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Perusahaan	Daerah
1.	Futures Trading Center (FTC) Community	Makassar
2.	PT HFX Internasional Berjangka	Makassar
3.	Karawang Forex Trader Academy - KFTA	Karawang
4.	PT Traderhub Indonesia	Jakarta
5.	PT Global Fiskal Solusi Asia	Jakarta
6.	PT Traderhub Indonesia	Jakarta
7.	NusaFX	Yogyakarta



8.	PT Esandar Arthamas Berjangka	Yogyakarta
9.	PT Indoforex Nasional Futures	Jakarta
10.	FBS Indonesia	Palembang

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Selain melakukan identifikasi lapangan, juga dilakukan identifikasi off-site melalui patroli siber terhadap media sosial, aplikasi dan situs web yang melakukan pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan Pemblokiran terhadap 185 (seratus delapan puluh lima) akun sosial media, 47 (empat puluh tujuh) aplikasi dan 314 (tiga ratus empat belas) domain situs web entitas di bidang PBK, SRG dan PLK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### 4. Pemeriksaan di bidang PBK, SRG dan PL

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran di bidang PBK dan SRG. Kegiatan Pemeriksaan ini sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sebanyak **43 (empat puluh tiga) kali** dengan rincian sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini:

**Tabel 2.6**

**Perusahaan/Nasabah yang diperiksa s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Perusahaan	Daerah
1.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama Suwandi	Melalui Zoom Meetings
2.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama Taufik	Melalui Zoom Meetings
3.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama E. Mamat Surachmat	Melalui Zoom Meetings
4.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama Susiliawati	Melalui Zoom Meetings
5.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama Dody Haryanto	Melalui Zoom Meetings

6.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru terkait pengaduan Nasabah atas nama Nur Surya Dewi	Melalui Zoom Meetings
7.	Pemeriksaan terhadap Perusahaan FTMO (Illegal)	Jakarta
8.	Pemeriksaan terhadap PT Sentratama Investor Berjangka (Illegal)	Jakarta
9.	Pemeriksaan PT Rifan Financindo Berjangka cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Agus Setiawan	Melalui Zoom Meetings
10.	Pemeriksaan PT Rifan Financindo Berjangka cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Lelly Wulani	Melalui Zoom Meetings
11.	Pemeriksaan PT Rifan Financindo Berjangka cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Anton Purnomo	Melalui Zoom Meetings
12.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Lifde Sibuea	Melalui Zoom Meetings
13.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Samsul Hidayat	Melalui Zoom Meetings
14.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Murni Sibuea	Melalui Zoom Meetings
15.	Pemeriksaan terhadap PT Victory International Futures (Illegal)	Jakarta
16.	Pemeriksaan terhadap PT Indometa Karya Nusantara (Illegal)	Jakarta
17.	Pemeriksaan terhadap PT Pintar Forex (Illegal)	Bandung
18.	Pemeriksaan terhadap PT Cyber Futures (Illegal)	Jakarta
19.	Pemeriksaan terhadap PT Esander Arthamas Berjangka (Illegal)	Jakarta
20.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Lifde Sibuea	Melalui Zoom Meetings
21.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures cabang Surabaya terkait pengaduan Nasabah atas nama Samsul Hidayat	Bandung
22.	Pemeriksaan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto a.n. PT Medi Crypto International terkait pelanggaran kepatuhan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto	Pemeriksaan Fisik
23.	Pemeriksaan Aliansi Kripto a.n. PT Aliansi Koin Indo terkait pelanggaran kepatuhan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto	Melalui Zoom Meetings
24.	Pemeriksaan PT Kontakperkasa Futures cabang Yogyakarta terkait pengaduan Nasabah atas nama Wahyurini	Yogyakarta
25.	Pemeriksaan PT Midtou Aryacom Futures cabang Yogyakarta terkait pengaduan Nasabah atas Dwi Sasongko	Yogyakarta

26.	Pemeriksaan PT Midtou Aryacom Futures cabang Yogyakarta terkait pengaduan Nasabah atas nama Umiyatul Chasanah	Melalui Zoom Meetings
27.	Pemeriksaan PT Rifan Financindo Berjangka terkait pengaduan Nasabah atas Beny Firmansyah	Melalui Zoom Meetings
28.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures terkait pengaduan Nasabah atas nama Lisniawati	Melalui Zoom Meetings
29.	Pemeriksaan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) terkait dugaan pelanggaran di bidang Pasar Fisik Emas Digital	Melalui Zoom Meetings
30.	Pemeriksaan PT Medi Crypto Internatioanal terkait dugaan pelanggaran Kepatuhan di bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto	Melalui Zoom Meetings
31.	Pemeriksaan terhadap PT Likuid Jaya Inisiasi (Sermorpheus) (Illegal)	Jakarta
32.	Pemeriksaan terhadap PT Quantum Metal Indonesia (QMI) (Illegal)	Jakarta
33.	Pemeriksaan terhadap PT Global Intra Berjangka (Illegal)	Jakarta
34.	Pemeriksaan terhadap PT Teknologi Struktur Berantai (Bitwyre) (Illegal)	Jakarta
35.	Pemeriksaan terhadap PT Indodax Nasional Indonesia (Illegal)	Jakarta
36.	Pemeriksaan terhadap PT Kebun Emas Nusantara (Illegal)	Jakarta
37.	Pemeriksaan terhadap PT Octa Investama Berjangka (Illegal)	Jakarta
38.	Pemeriksaan terhadap PT Indofores Nasional Futures (Illegal)	Jakarta
39.	Pemeriksaan PT Aliansi Koin Indo terkait dugaan pelanggaran Kepatuhan di bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto	Melalui Zoom Meetings
40.	Pemeriksaan PT Bursa Kripto Indonesia terkait dugaan pelanggaran Kepatuhan di bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto	Melalui Zoom Meetings
41.	Pemeriksaan PT Rifan Financindo Berjangka terkait pengaduan Nasabah atas Della Morita	Melalui Zoom Meetings
42.	Pemeriksaan PT Bestprofit Futures terkait pengaduan Nasabah atas nama Nobertus UA	Melalui Zoom Meetings
43.	Pemeriksaan terhadap PT Quantum Metal Indonesia terkait dugaan pelanggaran di bidang perdagangan emas digital	Melalui Zoom Meetings

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

5. Penyidikan di bidang PBK, SRG dan PL

Kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti awal yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang PBK dan SRG serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Kegiatan Penyidikan ini sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan sebanyak **2 (dua) kali** dengan rincian sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini:

**Tabel 2.7**

**Perusahaan/Nasabah yang di Sidik s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Perusahaan	Daerah	Keterangan
1.	PT Bestprofit Futures	Jakarta	Koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri terkait Rencana Penyidikan PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru
2.	PT Bestprofit Futures	Jakarta	Koordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRI terkait rencana Penyidikan atas dugaan pelanggaran oleh PT Bestprofit Futures cabang Pekanbaru

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Selain melakukan Identifikasi, Pemeriksaan dan Penyidikan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan juga melakukan penegakan hukum dengan mengeluarkan Sanksi Peringatan, Sanksi Pembekuan Izin Usaha, dan Sanksi Pencabutan Izin Usaha terhadap Pelaku Usaha berdasarkan rekomendasi hasil identifikasi, pemeriksaan, penyidikan dan pengawasan. Bappebti sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah memberikan sanksi sebanyak **402 (empat ratus dua) sanksi** terhadap Pelaku Usaha dengan rincian sebagaimana tabel 2.8 di bawah ini:

**Tabel 2.8**

**Pengenaan Sanksi terhadap Pelaku Usaha s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Jenis Peringatan	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Peringatan Integritas Keuangan Pialang/atau Pedagang Berjangka	23	Rekomendasi hasil Pengawasan
2.	Surat Peringatan Integritas Keuangan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	5	Rekomendasi hasil Pengawasan
3.	Surat Peringatan Market Maker (Volume Transaksi Pialang/atau Pedagang Berjangka dan Penyelenggara)	47	Rekomendasi hasil Pengawasan
4.	Surat Peringatan Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan	49	Rekomendasi hasil Pengawasan

5.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan (Kegiatan, Transaksi, dan Keuangan) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	159	Rekomendasi hasil Pengawasan
6.	Surat Peringatan Aset Kripto Diluar Ketentuan pada Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	1	Rekomendasi hasil Pengawasan
7.	Sanksi Denda atas Keterlambatan Laporan Keuangan Pialang/atau Pedagang Berjangka	30	Rekomendasi hasil Pengawasan
	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Emas Digital	9	
8.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyesuaian Margin di Lembaga Kliring Berjangka	21	Rekomendasi hasil Pengawasan
9.	Surat Peringatan Hasil Pemeriksaan Terkait Pengaduan Nasabah Pialang Berjangka dan Evaluasi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	30	Rekomendasi hasil Identifikasi, Pemeriksaan
10.	Surat Peringatan Penyampaian Laporan Nihil DTTOT	15	Rekomendasi hasil Pengawasan
11.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan (Kegiatan dan Transaksi) Pedagang Berjangka (Pialang, Fisik Timah, Fisik Emas, Kliring, dan Bank)	6	Rekomendasi hasil Pengawasan
12.	Sanksi Pembekuan Pialang Berjangka	4	Rekomendasi hasil Audit Bursa dan Kliring serta hasil Identifikasi
13.	Sanksi Pencabutan Pialang Berjangka	3	Rekomendasi hasil Pengawasan, Identifikasi, dan Pemeriksaan
<b>Total</b>		<b>402</b>	

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Faktor pendukung pencapaian target IKK Persentase Realisasi Penganan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan, yaitu:

- Adanya dukungan penuh dari semua pihak terutama para Nasabah, pelaku usaha, dan kepolisian. Semua pihak tersebut saling bersinergi dalam membantu Bappebti menindaklanjuti dan menangani permasalahan yang ada yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan undercover/identifikasi, pemeriksaan, maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Persentase Realisasi Penganan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil

Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan mengalami beberapa kendala seperti:

- Pihak dari perusahaan yang akan diperiksa, sudah tidak bekerja atau mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga proses pemeriksaan tidak maksimal.
- Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara *Self Regulatory Organization* (Bursa Berjangka) dengan Bappebti.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan pada Triwulan selanjutnya, yaitu:

- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung guna menyamakan persepsi mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang beserta dengan dugaan pelanggaran.
- Melakukan rekonsiliasi antara Bappebti dengan *Self Regulatory Organization* dalam hal penanganan kasus.

### **IKK-3 Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK**

Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk memberikan Konsultasi, Asistensi dan Pelayanan Hukum. Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi Hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai Ahli. Keterangan sebagai Saksi Ahli kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin maupun yang illegal.

Untuk mengukur capaian indikator Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

*(Jumlah konsultasi hukum tentang Peraturan di bidang PBK, SRG, dan PLK yang ditindaklanjuti/Jumlah konsultasi hukum tentang Peraturan di bidang PBK, SRG, dan PLK yang diajukan) x 100%*

**Tabel 2.9**  
**Capaian IKK-3 s.d. Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi s.d. Triwulan II 2024	Persentase Capaian Triwulan II (%)
Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	87%	72,13%	82,90%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.9, dapat dilihat bahwa Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK sampai dengan Triwulan II tercapai sebesar 72,13% (tujuh puluh dua koma tiga belas persen) dari target 87% (delapan puluh tujuh persen) dengan persentase capaian sebesar **82,90% (delapan puluh dua koma sembilan puluh persen)**. Pada Triwulan II tahun 2024 kegiatan permintaan Konsultasi Hukum sebanyak 61 (enam puluh satu) kali. Pada Triwulan I tahun 2024 kegiatan pemenuhan Konsultasi Hukum masih dalam proses sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Sedangkan, pada Triwulan I tahun 2024 kegiatan pemenuhan Konsultasi Hukum yang sudah selesai telah dilaksanakan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dengan rincian sebagaimana tabel 2.10 di bawah ini:

**Tabel 2.10**  
**Asistensi Hukum s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
1.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat Nomor: B/16468/XII/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023, perihal Permohonan Bantuan Penunjukkan dan Penghadapan Saksi Ahli	PT Wahana Bersama Nusantara (Fikasa Group)	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 22 Januari 2024

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
2.	Polda Bali	Memenuhi permintaan Ditreskrimsus Polda Bali untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat Nomor: B/32/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 4 Mei 2023, perihal Permohonan Penunjukkan Ahli dengan Terlapor Platform TDP, Quantum RVD, Coin RVD	Fortune Family Club'99 Seke Demen Family Komang Sri Martini Putu Swantika	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 9 Januari 2023
3.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit I Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat Nomor: B/3981/IX/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 11 September 2023 perihal Permohonan Penunjukkan Saksi dan Permohonan Data Transaksi	PT Interpan Pasifik	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 6 Maret 2024
4.	Polda Bali	Memenuhi permintaan Unit 2 Subdit II Ditreskrim Polda Bali berdasarkan surat Nomor: B/1378/X/RES.1.11/2023/Ditreskrim tanggal 25 Oktober 2023 perihal Mohon Keterangan Saksi	Dana Oil Konsorsium	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 29 Februari 2024
5.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Polres Gresik berdasarkan surat Nomor: B/6/I/2023/Reskrim tanggal 3 Januari 2024 perihal Bantuan Menghadirkan Saksi dengan Terlapor PT Indosterling Optima Investa	PT EWF	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 19 Maret 2024
6.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/341/I/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Data dan Menghadirkan Saksi	PT BPF	Sudah selesai memberikan keterangan di Kepolisian tanggal 23 Februari 2024



No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
7.	Polda Jawa Tengah	Memenuhi permintaan Unit 1 Subdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor: B/98/I/RES.2.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Pendapat Ahli	PT RFB	Sudah selesai memberikan keterangan melalui surat tanggal 27 Maret 2024
8.	Kejaksaan Tinggi Banten	Memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan berdasarkan surat Nomor: PDM-285/M.6.16/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 Januari 2024 sehubungan dengan perkara an. Terdakwa I Hendra dan Terdakwa II Nicolaus Iskandar	Kejaksaan Tinggi Banten	Sudah selesai memberikan keterangan melalui surat tanggal 24 Januari 2024
9.	Polda Jawa Barat	Memenuhi permintaan Unit III Polsek Lengkong berdasarkan surat Nomor: B/06/II/2024/Reskrim tanggal 7 Februari 2024 perihal Permohonan Menghadirkan Saksi	Start Trader dan GWX	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 6 Maret 2024
10.	Pengadilan Jakarta Pusat	Memenuhi permintaan Direktur Utama PT Monex Investindo Futures berdasarkan surat Nomor: 032/MIF-DIR/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Saksi Ahli atas Persidangan Perkara Perdata Nomor 454/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.	PT Monex Investindo Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 4 Maret 2024
11.	Bareskrim	Memenuhi permintaan Subdit 3 Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/46/II/RES.2.6./2024/Dittipi deksus tanggal 15 Februari 2024 perihal Permintaan Keterangan Ahli	PT Trust Global Karya PT Asia Smart Digital (ASD) Viral Blast Global	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 4 Maret 2024

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
12.	Polda Kepulauan Riau	Memenuhi permintaan Ditreskrim Polda Kepri berdasarkan surat Nomor: B/68/III/RES.1.11./2024/Ditr eskrim tanggal 6 Maret 2024 perihal Permintaan Keterangan Saksi terkait Legalitas Triumph FX	Triumph FX	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 28 Maret 2024
13.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit I Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor:B/894/III/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 4 Maret 2024 perihal Permohonan Penunjukkan Saksi Ahli	PT EWF	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 22 Maret 2024
14.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat Nomor: PDM-90/P.4.10/Eoh.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Puput Hendra Wijaya	MNC Securitas	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 19 Maret 2024
15.	Rifqi Septyanto	Memenuhi permintaan Sdr. Rifqi Septyanto untuk memberikan keterangan legalitas entitas usaha usdtimok.com melalui surat elektronik tanggal 24 Februari 2024 perihal Broker Pialang Crypto Bermasalah.	Usdtimok.com	Sudah selesai memberikan Asistensi Hukum tanggal 26 Februari 2024
16.	Kantor Hukum Syahrizal Hadi Harahap & Rekan	Memenuhi permintaan Kantor Hukum Syahrizal Hadi Harahap & Rekan berdasarkan surat Nomor: KH-SHH&R/Perkara Perdata/B/08/I/2024 perihal Mohon Informasi Status Legalitas T Andriansyah selaku Wakil Pialang Berjangka dan Mohon Legalitas PT Oval Capital International selaku Pialang Berjangka	PT Oval Capital International	Sudah selesai memberikan Asistensi Hukum tanggal 19 Februari 2024

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
17.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit V Harda Reskrim Polres Jakarta Barat berdasarkan surat Nomor: B/526/II/HUM.2.2./2024/Res tro JB tanggal 27 Februari 2024 perihal Bantuan Penunjukkan Saksi dan Permintaan Data Legalitas Perizinan Trading Forex dan GOLD COIN (RUMAH INVESTASI)	Trading Forex & Gold Coin "Rumah Investasi"	Sudah selesai memberikan Asistensi Hukum melalui surat tanggal 20 Maret 2024
18.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit IV Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor: B/720/II/RES.2.6./2024/Ditre skrimsus tanggal 22 Februari 2024 perihal Permohonan Pengecekan Legalitas	AleviusX	Sudah selesai memberikan Asistensi Hukum melalui surat tanggal 20 Maret 2024
19.	Kantor Hukum AFS & Partners Counsellors at Law	Memenuhi permintaan Kantor Hukum AFS & Partners Counsellors at Law berdasarkan surat Nomor: 23/AFS-ky/IV/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Permohonan Ahli Bappebti.	PT Trijaya Pratama Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 30 April 2024.
20.	Polres Metro Jakarta Selatan	Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor; B/2716/II/2024/Sat Reskrim tanggal 28 Februari 2024 perihal Bantuan Penunjukkan Saksi Ahli.	PT BPF	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 29 April 2024.
21.	Bareskrim Polri	Memenuhi permintaan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/46/II/RES.2.6./2024/Dittipi deksus tanggal 15 Februari 2024 perihal Permintaan Keterangan Ahli.	PT Trust Global Karya PT Asia Smart Digital (ASD) Viral Blast Global	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 25 April 2024.

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
22.	Ketua Tim Bidang Penindakan PBK, Pasar Fisik, SRG dan PLK Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan	Memenuhi permintaan Ketua Tim Bidang Penindakan PBK, Pasar Fisik, SRG dan PLK Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan berdasarkan surat Nomor: UD.01.00/01/BAPPEBTI.2/S D/S.Ahli/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Permintaan Bantuan Penunjukkan Saksi Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi.	PT UAF	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 30 April 2024.
23.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/1210/III/RES.2.6./2024/Dit reskrimsus tanggal 22 Maret 2024 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Perizinan dan Penunjukkan Saksi.	Aplikasi Gigamax	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas tanggal 17 April 2024.
24.	Polda Banten	Memenuhi permintaan Polres Tangerang Selatan berdasarkan surat Nomor: B/619/II/RES.1.11/2024/Res krim tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Menghadirkan Saksi	Deriv Limited	Sudah selesai memberikan keterangan Saksi tanggal 25 April 2024.
25.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit IV Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/1217/III/RES.2.6./2024/Dit reskrimsus, tanggal 22 Maret 2024 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Perizinan dan Penunjukkan Saksi	EXNESS	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas tanggal 17 April 2024.
26.	Polrestabes Bandung	Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung berdasarkan surat Nomor: B/2458/V/RES.1.11/2023/Re skrim tanggal 31 Mei 2023 perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara.	Global Artha Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 14 Mei 2024.

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
27.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Satreskrim Polrestabes Surabaya berdasarkan surat Nomor: B/4660/I/RES.1.11/2024/Sat reskrim tanggal 23 Januari 2024 perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli Perdagangan Berjangka	Vina Invest	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 16 Mei 2024.
28.	Polrestabes Pekanbaru	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo berdasarkan surat Nomor: B/882/IV/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 30 April 2024 perihal Klarifikasi/Permintaan Keterangan.	PT BPF	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 20 Mei 2024.
29.	Polda Gorontalo	Memenuhi permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo melalui surat Nomor: B/47/IV/Res.2./2024/Ditreskrimsus tanggal 24 April 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli Bappebti.	OctaFx dan HBS	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 20 Mei 2024.
30.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan surat Nomor: B/2466/III/Res.1.11./2024/Restro Jakpus tanggal 15 Maret 2024 perihal Mohon Bantuan Penghadapan Saksi	PT Topgrowth Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 28 Mei 2024.
31.	P. Dwiraharjo	Dalam rangka memenuhi permintaan Sdr. P Dwiraharjo untuk memberikan keterangan legalitas entitas usaha melalui surat elektronik tanggal 20 Mei 2024 perihal Mohon Kepastian Akun Trading.	Xetra Trading	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas tanggal 27 Mei 2024.
32.	Polres Metropolitan Bekasi	Memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berdasarkan surat Nomor: B/1994/III/Res.1.2.4/2024/Restro Bks tanggal 26 Maret 2024 perihal Undangan Klarifikasi	Cyber Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 13 Juni 2024.

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
33.	Densus 88 Anti Teror Polri	Memenuhi permintaan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri berdasarkan surat Nomor: B/1851/IV/RES.6.1./2024/Densus tanggal 23 April 2024 perihal Bantuan Pemeriksaan Keterangan Ahli.	PT Indodax Nasional Indonesia PT Pintu Kemana Saja	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 5 Juni 2024.
34.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur berdasarkan surat Nomor: B/Und-219/IV/RES.1.11./2024/Ditreskrim tanggal 5 April 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli.	PT Mandala Karya Persada (Sdr. Yosua Jahja)	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 19 Juni 2024.
35.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/1707/V/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 6 Mei 2024 perihal Permohonan Pengecekan Legalitas.	Hilton Kapital Internasional	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas tanggal 6 Juni 2024
36.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan dari Unit IV Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/2125/V/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus, 31 Mei 2024 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Perizinan	Weltrade OctaFx XM	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas tanggal 21 Juni 2024
37.	Polda Kalimantan Tengah	Memenuhi permintaan dari Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: B/1722/VI/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus, 6 Juni 2024 perihal Permintaan Data	PT BPF	Sudah selesai memberikan keterangan legalitas

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
38.	Polda Sumatera Utara	Memenuhi permintaan Subnit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Medan berdasarkan surat Nomor: B/16177/XII/RES.1.11./2023 /Reskrim tanggal 28 Desember 2023, perihal Permintaan Keterangan/Penjelasan	Guardian Capital Group	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli
39.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/1428/I/RES.2.5./2024/Ditr eskrim sus tanggal 23 Januari 2024 perihal Permohonan Data dan Menghadirkan Saksi	PT Topgrowth Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli
40.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Unit IV Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berdasarkan surat Nomor: B/8/I/RES.2.2./2024/Ditreskr im sus tanggal 15 Januari 2024 perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen	PT RFB	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli
41.	Bappebti	Memenuhi permintaan PPNS Bappebti berdasarkan surat Nomor: UD.01.00/01/BAPPEBTI.2/S D/S.Ahli/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Permintaan Bantuan Penunjukkan Saksi Ahli Perdagangan Berjangka Komoditi	PT United Asia Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 30 April 2024
42.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Memenuhi permintaan Direktur Utama PT Trijaya Pratama Futures berdasarkan surat Nomor:13/TPFx/SK-20AE/27B24 tanggal 27 Februari 2024 perihal Permohonan Keterangan Ahli	PT Trijaya Pratama Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli tanggal 24 April 2024

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
43.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan dari Direktur Reserse Kriminal melalui surat Nomor: B/1979/IV/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 17 April 2024 perihal Mohon Bantuan Penunjukkan Saksi.	PT Pasific Duaribu Futures	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli
44.	Kejaksaan Tinggi Yogyakarta	Memenuhi permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor: B-245/M.4/Fd.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Bantuan Keterangan Ahli.	PT Taru Martani	Sudah selesai memberikan keterangan Ahli
45.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/1034/IV/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Penunjukkan Saksi Ahli.	PT BPF	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
46.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/1427/I/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 23 Januari 2024 perihal Permohonan Data dan Menghadirkan Saksi	PT RFB	Menunggu BAP dari Penyidik
47.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/3008/V/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, 30 Mei 2024 perihal Bantuan Penghadapan dan Penunjukkan Saksi	Bank Barclays ATG	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
48.	Polda Jawa Tengah	Memenuhi permintaan Polres Sukoharjo berdasarkan surat Nomor: B/156/V/HUM.5.1/2024/Reskrim, 29 Mei 2024 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Saksi	Rajacoin	Penyidik Minta Ditunda



No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
49.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Satreskrim Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor: B/5892/VI/2024/Sat Reskrim, 13 Mei 2024 perihal Permohonan Bantuan Penunjukkan Dan Penghadapan Ahli	PT Guardian Capital Group (GCG)	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
50.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit IV Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/9203/VI/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus, 20 Juni 2024 perihal Permohonan Penunjukkan Saksi dan Permohonan Data Transaksi	Cyber Futures	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
51.	Bareskrim	Memenuhi permintaan Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri berdasarkan surat Nomor: B/3792/VI/RES.1.24./2024/Dittipidum, 10 Juni 2024 perihal Menghadirkan Saksi	PT Trijaya Pratama Futures	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
52.	Polda Jawa Barat	Memenuhi permintaan Polres Bogor berdasarkan surat Nomor: B/2550/VI/2024/Reskrim, 3 Juni 2024 perihal Undangan Wawancara dan Permintaan Dokumen	Robot Forex ATG	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
53.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan surat Nomor: B/5525/VI/Res.1.11/2024/Restro JP, 6 Juni 2024 perihal Penghadapan Saksi	Exness	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
54.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Unit I Subdit II Ditreskrimum Polda Jawa Timur berdasarkan surat Nomor: B/4865/VI/RES.1.11./2024/Ditreskrimum, 6 Juni 2024 perihal Permintaan Keterangan	Guardian Capital Group	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
55.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Unit I Subdit III Ditreskrim Polda Jawa Timur berdasarkan surat Nomor: B/2132/VI/RES.1.11./2024/Ditreskrim, 7 Juni 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan	DNA Pro	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
56.	Polda Kalimantan Tengah	Memenuhi permintaan Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah berdasarkan surat Nomor: B/1723/VI/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus, 6 Juni 2024 perihal Permintaan Data	PT BPF	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
57.	Polda Sulawesi Selatan	Memenuhi permintaan Satreskrim Polrestabes Makassar berdasarkan surat Nomor: B/1171/VI/RES.1.11/2024/R eskrim, 4 Juni 2024 perihal Permintaan Penjelasan	MNC Securitas	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
58.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Unit II Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berdasarkan surat Nomor: B/2187/VI/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus, 5 Juni 2024 perihal Permohonan Data dan Keterangan	PT Indoforex Nasional Futures Exness PT Kliring Berjangka Indonesia	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
59.	Polda Metro Jaya	Memenuhi permintaan Polsek Metropolitan Gambir berdasarkan surat Nomor: B/769/VI/2024/SEK GBR, 19 Juni 2024 perihal Permintaan Keterangan	PTE Ltd	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli
60.	Polda Gorontalo	Memenuhi permintaan Subdit V Tipidisber Ditreskrimsus Polda Gorontalo berdasarkan surat Nomor: B/685/VI/2024/Ditreskrimsus, 28 Juni 2024 perihal Permintaan Data Legalitas	SMART WALLET	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli

No.	Permintaan	Tujuan	Perusahaan	Keterangan
61.	Polda Jawa Timur	Memenuhi permintaan Satreskrim Polresta Malang Kota berdasarkan surat Nomor: B/124/VI/RES.1.11/2024/Satreskrim, 13 Juni 2024 perihal Bantuan Penunjukkan Ahli	Twintrend dan GKIB	Sedang dalam proses pemberian keterangan Ahli

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Faktor pendukung pencapaian target IKK Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG, yaitu:

- Banyaknya permintaan konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK.
- Adanya dukungan penuh dari semua pihak terkait terutama pelaku usaha dan kepolisian sehingga Bappebti berhasil menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam hal pemenuhan saksi ahli.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK mengalami beberapa kendala seperti:

- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan;
- Jumlah personil yang kurang, karena terbatasnya jumlah ahli PBK, SRG dan PLK di Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK pada Triwulan selanjutnya, yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan Penyidik terkait pemberian waktu keterangan, untuk menentukan skala prioritas dari kasus;
- Melakukan review dari pejabat yang lebih berpengalaman.

#### **IKK-4 Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan**

Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan merupakan juga indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Menangani secara cepat setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti dan mengupayakan agar Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti menjadi pihak yang terlindungi dari gugatan hukum pihak lain.
2. Menangani setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan dan menghindari Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang tidak terlindungi karena tidak jelasnya penanganan perkara gugatan hukum tersebut.

Untuk mengukur capaian indikator Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

*(Jumlah litigasi dan penanganan perselisihan yang ditindaklanjuti/Jumlah litigasi dan penanganan perselisihan yang diterima) x 100%*

**Tabel 2.11**  
**Capaian IKK-4 s.d. Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi s.d. Triwulan II 2024	Persentase Capaian Triwulan II (%)
Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan	90%	100%	117,64%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Pada tahun 2024, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti mempunyai target kegiatan Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan sebesar **90% (sembilan puluh persen)**. Dalam pelaksanaan kegiatan Permintaan Gugatan Hukum dan/atau Pemenuhan Litigasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak **33 (tiga puluh tiga) kali**. Pada Triwulan II tahun 2024 kegiatan Permintaan dan/atau Pemenuhan Penanganan Perselisihan telah dilaksanakan sebanyak **47 (empat puluh tujuh) kali**. Pada Triwulan II tahun 2024 kegiatan Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan telah terealisasi sebesar **100% (seratus persen)** dengan persentase capaian sebesar **117,64% (seratus tujuh belas koma enam puluh empat persen)** dengan rincian sebagaimana tabel 2.12 dan tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.12

## Penanganan Litigasi s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( <b>7 kali</b> )	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 780/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari, 16 Januari, 29 Januari, 6 Februari, 27 Februari, 19 Maret dan 14 Mei 2024 dengan Penggugat Asti Budi Larasati dan Tergugat PT Bestprofit Futures serta Bappebti selaku Turut Tergugat	PT Bestprofit Futures (Tergugat) Bappebti (Turut Tergugat)
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ( <b>10 kali</b> )	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 603/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari, 16 Januari, 30 Januari, 6 Februari, 21 Februari, 29 Februari, 7 Maret, 28 Maret, 23 April, dan 7 Mei 2024 dengan Penggugat Chi Ming Li, dkk dan PT United Asia Futures (Tergugat I)	PT United Asia Futures (Tergugat) Bappebti (Turut Tergugat)
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( <b>5 kali</b> )	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 996/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari, 16 Januari, 6 Februari, 27 Februari dan 13 Maret 2024 dengan Penggugat Dianita Tiurida Nasution, dkk dan Erwin Seriyanto (Tergugat I)	Erwin Seriyanto (Tergugat I), Erwan Seriyanto (Tergugat II), Stephanie Mulyadi (Tergugat III), PT Global Kapital Investama Berjangka (Tergugat IV), dan Bappebti (Turut Tergugat)
4.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( <b>2 kali</b> )	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 788/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari dan 19 Februari 2024 dengan Penggugat Asti Budi Larasati dan Tergugat PT Rifan Financindo Berjangka serta Bappebti selaku Turut Tergugat	PT Rifan Financindo Berjangka (Tergugat), Bappebti (Turut Tergugat I) serta PT Bursa Berjangka Jakarta (Turut Tergugat II)

5.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat <b>(9 kali)</b>	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Maret, 26 Maret, 23 April, 30 April, 7 Mei, 21 Mei, 4 Juni, 19 Juni, dan 25 Juni 2024 dengan Penggugat Albertus Yoseph, dkk dan PT Equityworld Futures (Tergugat I)	PT Equityworld Futures (Tergugat I), BAPPEBTI (Turut Tergugat II), PT Bursa Berjangka Jakarta (Turut Tergugat IV), dan PT Royal Assetindo (Turut Tergugat V)
----	--	---	--

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

**Tabel 2.13**

**Permintaan dan Pemenuhan Penanganan Perselisihan secara *online* s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Nasabah	Pengaduan	Perusahaan	Keterangan
1.	Daweiri Tanu	Tidak bisa withdrawal	International Business Futures	KASUS SELESAI
2.	Skriven Yermia Manongko	Tidak bisa withdrawal	Finex Bisnis Solusi Futures d/h Finex Berjangka	KASUS SELESAI
3.	Eko Wati	Adanya pembelian 6 lot sell harga 2012,00 diluar sepengetahuan kami yg secara otomatis dilakukan oleh pihak BPF tanpa adanya konfirmasi maupun pemberitahuan	Bestprofit Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ namun tidak tercapai kesepakatan
4.	Yustina Supatmi	Janji diluar kewajaran	International Business Futures	KASUS SELESAI
5.	Ridwan BME	Janji diluar kewajaran, Nasabah diiming-iming keuntungan dan keamanan dana	Bestprofit Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ namun tidak tercapai kesepakatan
6.	Hj. Eliyana	Janji diluar kewajaran	Cyber Futures	KASUS SELESAI
7.	Andry Oktavianes	Lain-lain, transaksi Nasabah yang ada di pasar, terlikuidasi sendiri oleh Indosukses dengan alasan rasio dana Nasabah dibawah 100% dan kondisi ini tanpa sepengetahuan ada konfirmasi kepada Nasabah sebelumnya	Indosukses Futures	KASUS SELESAI
8.	Henny Hartono	Nasabah dijanjikan iming-iming akan ditradingkan dengan komisi sebesar 70:30 dan mengalami <i>loss</i>	Cyber Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ, namun tidak tercapai kesepakatan

9.	Ardian Angga Saputra	Nasabah tidak memiliki pengetahuan di bidang PBK dan tidak dijelaskan secara lengkap mengenai transaksi perdagangan berjangka dan mengalami <i>loss</i>	Rifan Financindo Berjangka	KASUS SELESAI
10.	Raike Dia Pitaloka	Transaksi diluar kewajaran	Monex Investindo Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
11.	Angga Dwi Narno	Transaksi diluar kewajaran	Monex Investindo Berjangka	KASUS SELESAI
12.	Joko Sentono	Transaksi diluar kewajaran	Trive Invest Futures d/h Global Kapital Investama Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di BKDI
13.	Suhar Yanti	Transaksi diluar kewajaran	Cyber Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ, namun tidak tercapai kesepakatan
14.	Moch Ilimi Arham	Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan tanpa persetujuan Nasabah	International Business Futures	KASUS SELESAI
15.	Nico Adhi Pradhono	Janji diluar kewajaran, berupa iming-iming 50 gram emas, dan nominal Rp.500.000.000 akan berhadiah mobil Mitsubishi expander	International Business Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ, namun tidak tercapai kesepakatan
16.	Sucipto	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti (fixed inome) oleh marketing an. Sdr. Hana	Rifan Financindo Berjangka	KASUS SELESAI
17.	Rino Ardiyani Armi	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan pasti yang dapat ditarik harian	Midtou Aryacom Futures	Monitor penanganan pengaduan di BKDI
18.	Boedianto Sidik	Meminta penutupan account dan pencairan dana kepada PT MAF an Sdr. Friska Simbolon dan Sdr. Emi Yunistasari sejak tanggal 29 Februari 2024, namun sampai dengan hari ini belum diproses	Midtou Aryacom Futures	KASUS SELESAI

19.	Sugito	Nasabah mengikuti program promosi "double point imlek" dan menandatangani dana sebesar \$7000 (tujuh ribu dollar). Selanjutnya melakukan trading dengan menggunakan locking order	Handal Semesta Berjangka	KASUS SELESAI
20.	Samuel Then	Akun Nasabah di hack pada tanggal 21 Maret 2024	Victory International Futures	KASUS SELESAI
21.	Andrewly	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFx dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
22.	Margaret	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFx dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
23.	Henrik	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFx dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ



24.	Abdi Martinus Ginting	Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan. Nasabah memberikan akun kepada pihak lain karena dijanjikan iming-iming dengan ditunjukan hasil transaksi akun lain yang dikelola oleh marketing yang bersangkutan	Handal Semesta Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
25.	Tumbur Simangunsong	Janji diluar kewajaran, berupa reward berupa pin emas pada akhir tahun jika mendaftar sebelum akhir tahun	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
26.	Nurhilal	KYC tidak tepat, Nasabah tidak memahami perdagangan di bidang PBK. Tidak dijelaskan Risiko dan Perjanjian Amanat	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
27.	Angeraigo Halawa	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan	Valbury Asia Futures	KASUS SELESAI
28.	Nadirun	Janji diluar kewajaran	Cyber Futures	Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan
29.	Angga Hafidh Fahrizal	Janji diluar kewajaran, Nasabah diiming-iming ganti kerugian akibat trading sebelumnya di OctaFX	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
30.	Niadi Kurniawan	Janji diluar kewajaran, Nasabah diiming-iming keuntungan pasti sebesar 15%-20% setiap bulannya	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
31.	Acep Rohadi	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan.	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

32.	Delly Armand	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan.	Cyber Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
33.	Martinus Wijaya	Nasabah melakukan deposit dana pada PT TIF, setelah mendapatkan profit, akun Nasabah diblokir oleh PT TIF sehingga Nasabah tidak dapat melakukan transaksi lagi sejak tanggal 30 Mei 2024 dan telah menghubungi pihak PT TIF namun belum ada jawaban	Trive Invest Futures d/n Global Kapital Instama Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
34.	Riah Samsiah	Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Transaksi dilakukan oleh WPB atau Pihak Perusahaan	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
35.	Fachlul Infithar	Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Tidak dijelaskan adanya Risiko dan Perjanjian Amanat	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
36.	Suwardi	Nasabah dijanjikan iming-iming berupa keuntungan besar. Transaksi dilakukan oleh WPB atau Pihak Perusahaan	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
37.	Muhammad Anton Wahid	Bahwa telah terjadi wrong quote pada produk gold (XAUUSD) pada tanggal 4 Juni 2024 sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
38.	Elfianto Silalahi	KYC tidak tepat, Nasabah merupakan pensiunan yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki kewenangan di bidang PBK	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
39.	Asep Saepudin Hidayat	Tidak dijelaskan adanya Risiko dan Perjanjian Amanat. Transaksi dilakukan oleh Pihak Perusahaan	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

40.	Eni Rusiani	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti. Tidak dijelaskan adanya Risiko dan Perjanjian Amanat	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
41.	Robby Tunggal Alam	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti. Tidak dijelaskan adanya Risiko dan Perjanjian Amanat	Rifan Financido Berjangka	Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kesepakatan
42.	Drs. Herman Yoseph Aiwan	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti. Tidak dijelaskan adanya Risiko dan Perjanjian Amanat	International Business Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
43.	Sri Rejeki	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti. Transaksi dilakukan oleh Pihak Perusahaan	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
44.	Tommy Andrian	Transaksi janggal, Nasabah menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh Universe Synergy Futures	Universe Synergy Futures d/h Prudent Internasional Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
45.	Fenny	Transaksi dilakukan oleh Pihak Perusahaan	Bestprofit Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
46.	Ayunda Augusteen	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti.	Rifan Financido Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
47.	Iriko Massaile	Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti. Transaksi dilakukan oleh Pihak Perusahaan	Sentratama Investor Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Faktor pendukung pencapaian target IKK Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan, yaitu:

- Banyaknya panggilan sidang perkara perdata yang melibatkan Bappebti sebagai tergugat atau turut tergugat.
- Adanya dukungan penuh dari semua pihak terkait terutama pelaku usaha dan kepolisian sehingga Bappebti berhasil menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam menangani perkara PTUN, PN, dan Praperadilan.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan mengalami beberapa kendala seperti:

- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti.
- Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan pada Triwulan selanjutnya, yaitu:

- Segera menindaklanjuti apabila terdapat perkara gugatan hukum, dan tetap mengikuti sesuai jadwal sidang.
- Mengatur pegawai yang beracara sesuai dengan jadwal sidang.

#### **IKK-5 Persentase Hasil Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto**

Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto merupakan Indikator Kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.
2. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang Aset Kripto untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan.
3. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang Aset Kripto yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah.
4. Memberikan Konsultasi, Asistensi dan Pelayanan Hukum di bidang Aset Kripto.

Untuk mengukur capaian indikator Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

[70% x (Jumlah Persentase penerapan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto) + 30% x (Jumlah Persentase pemenuhan konsultasi hukum, asistensi hukum, dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto)]

**Tabel 2.14**  
**Capaian IKK-5 s.d. Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi s.d. Triwulan II 2024	Persentase Capaian Triwulan II (%)
Persentase Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto	89%	92.23%	103,62%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.14, dapat dilihat bahwa Persentase Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto sampai dengan Triwulan II dapat tercapai sebesar **92.23% (sembilan puluh dua koma dua puluh tiga persen)** dari target sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) dengan persentase capaian sebesar **103,62% (seratus tiga koma enam puluh dua persen)**.

- Persentase penerapan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto

$$A = \frac{\text{Jumlah sanksi yang dikenakan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto}}$$

$$A = \frac{172}{169} \times 100\% = 101,77\%$$

- Persentase pemenuhan konsultasi hukum, asistensi hukum, dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto

$$A = \frac{\text{Jml pemenuhan konsultasi hukum, asistensi hukum, dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto}}{\text{Jumlah permintaan konsultasi hukum, asistensi hukum, dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto}}$$

$$A = \frac{7}{10} \times 100\% = 70\%$$

**Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto sebesar**

$$= (70\% \times 101,77\%) + (30\% \times 70\%)$$

$$= 71,23\% + 21\%$$

$$= \mathbf{92,23\% \text{ (sembilan puluh dua koma dua puluh tiga persen)}}$$

Untuk mendukung tercapainya IKK-5 Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto dilaksanakan beberapa kegiatan seperti:

- a. Pengenaan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto

Kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat dan terciptanya penegakan hukum di bidang aset kripto sampai dengan Triwulan II kegiatan Pengenaan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto telah dilakukan sebanyak **172 (seratus tujuh puluh dua) sanksi yang dikenakan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) rekomendasi hasil pengawasan di bidang aset kripto** dengan rincian sebagaimana tabel 2.15 di bawah ini:

**Tabel 2.15**  
**Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Aset Kripto**

No.	Jenis Peringatan	Jumlah
1.	Surat Peringatan Terkait Integritas Keuangan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	5
2.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Transaksi Calon Pedagang Fisik Aset Krpto	53
3.	Surat Peringatan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	86
4.	Surat Peringatan Keterlambatan Laporan Kegiatan Calon Pedagang Aset Fisik Kripto	20
5.	Surat Peringatan Terkait DTTOT Calon Pedagang Aset Fisik Kripto	4
6.	Surat Peringatan Aset Kripto Diluar Ketentuan pada Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	1
7.	Surat Peringatan Hasil Pemeriksaan Terkait Pengaduan Nasabah Evaluasi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	3
<b>Total</b>		<b>172</b>

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

- b. Pemenuhan konsultasi hukum, asistensi, dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto

Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi Hukum dalam penanganan kasus Aset Kripto. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan penanganan pengaduan. Di bidang pelayanan hukum, Bappebti menerima dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka sampai dengan Triwulan II kegiatan pemenuhan konsultasi, asistensi, dan penanganan pengaduan di bidang aset

kripto telah dilakukan sebanyak **7 (tujuh) pemenuhan konsultasi, asistensi dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto dan 10 (sepuluh) permintaan konsultasi, asistensi dan penanganan pengaduan di bidang aset kripto** dengan rincian sebagaimana tabel 2.16 di bawah ini:

**Tabel 2.16**  
**Kegiatan Pelayanan Hukum di Bidang Aset Kripto**

No.	Jenis Peringatan	Jumlah
1.	Permintaan Konsultasi Hukum, Asistensi, dan Penanganan Pengaduan Aset Kripto	10
2.	Pemenuhan Konsultasi Hukum, Asistensi, dan Penanganan Pengaduan Aset Kripto	7

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Faktor pendukung pencapaian target IKK Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto, yaitu:

- Adanya dukungan penuh dari semua pihak terutama para Nasabah, pelaku usaha, dan kepolisian. Semua pihak tersebut saling bersinergi dalam membantu Bappebti menindaklanjuti dan menangani permasalahan yang ada yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan undercover/identifikasi, pemeriksaan, maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti.
- Adanya dukungan penuh dari semua pihak terkait terutama pelaku usaha dan kepolisian sehingga Bappebti berhasil menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas khususnya dalam hal pemenuhan saksi ahli.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto mengalami beberapa kendala seperti:

- Perbedaan pemahaman suatu kasus diantara para pemeriksa dalam menindaklanjuti kasus.
- Pelaksanaan kegiatan asistensi hukum tidak tepat waktu, karena Permintaan keterangan saksi/ahli dalam waktu yang bersamaan atau ada tugas atau pekerjaan lain yang bersamaan dengan permintaan.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Persentase hasil penegakan dan pelayanan hukum di bidang aset kripto pada Triwulan selanjutnya, yaitu:

- Rekonsiliasi internal di lingkungan Bappebti dalam hal pengumpulan informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus.
- Melakukan koordinasi dengan Penyidik terkait pemberian waktu keterangan, untuk menentukan skala prioritas dari kasus.

#### **IKK-6 Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum**

Salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti melalui Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan adalah layanan pengaduan dan konsultasi hukum. Seringkali dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh karena itu Bappebti memberikan wadah sebagai pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Bappebti juga memberikan layanan konsultasi hukum untuk memberikan informasi hukum seperti peraturan yang terkait dengan PBK, SRG dan PLK. Untuk memperoleh indeks kepuasan layanan pengaduan dan konsultasi hukum dilakukan survey kepada pengguna layanan. Penggunaan metode survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

**Tabel 2.17**  
**Kriteria Mutu Pelayanan**

<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>:</b>	<b>88,31-100</b>
<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>:</b>	<b>76,61-88,30</b>
<b>C</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>:</b>	<b>65,00-76,60</b>
<b>D</b>	<b>Tidak Baik</b>	<b>:</b>	<b>25,00-64,99</b>

**Tabel 2.18**  
**Capaian IKK-6 s.d Triwulan II Tahun 2024**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi s.d. Triwulan II 2024</b>	<b>Persentase Capaian Triwulan II (%)</b>
Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum	87	92.85	106,72%

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Berdasarkan tabel 2.18, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan dan Konsultasi Hukum sampai dengan Triwulan II berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik Bappebti Tahun 2024 Tahap I tercapai dengan perolehan skor sebesar **92.85 (sembilan puluh dua koma delapan**



**puluh lima) dengan kategori “Sangat Baik”** dari target sebesar 87 (delapan puluh tujuh) atau tercapai dengan persentase sebesar **106,72% (seratus enam koma tujuh puluh dua persen)** dari target tahun 2024.

## VII. Pengelolaan Ketatausahaan Biro

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan dan tata usaha dan rumah tangga Biro berdasarkan pasal 244 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan di bentuk untuk mendukung Subbagian Tata Usaha Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti. Untuk mendukung kegiatan operasional Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan yang memiliki 3 (tiga) fungsi tugas lainnya maka kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan Biro dibutuhkan dalam pelaksanaan urusan - urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Tata Usaha adalah Penyusunan Program, Penyusunan Rencana Kinerja, Melakukan Evaluasi Kinerja, Pengadministrasian Surat Masuk dan Surat Keluar Biro, Pengadministrasian Barang Milik Negara, Pengadministrasian Alat Tulis Kantor, Pemeliharaan Barang dan Aset Biro dan Laporan pelaksanaan pengelolaan Tata Usaha Biro telah dilaksanakan sebanyak **10 (sepuluh) kali** dengan rincian sebagaimana tabel 2.19 di bawah ini:

**Tabel 2.19**  
**Kegiatan Ketatausahaan s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	Daerah	Kegiatan
1.	Bandung	Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui Surat Nomor: PR/00.01/24/BAPPEBTI.1/UND/01/2024 Tanggal 5 Januari 2024 mengenai Undangan Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Penyusunan Rencana Aksi Bappebti Tahun 2024
2.	Semarang	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: KP.09.15/056/SJ-DAG.10/UND/01/2024 Tanggal 12 Januari 2024 mengenai Undangan Rapat Pembahasan Target Output Kinerja Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan
3.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: DL.00.02/148/SJ-DAG,10/UND.01/2024 Tanggal 26 Januari 2024 mengenai Perubahan Kompetensi Terintegrasi

4.	Depok	Menghadiri Undangan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Surat Nomor: OT.00/122/SJ-DAG /UND/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Undangan Pembahasan Peta Resiko Tahun 2024
5.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui surat Nomor: KP.09.15/324/SJ-DAG.10/UND/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Undangan Rapat Finalisasi Target Output Kinerja Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan
6.	Yogyakarta	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum berdasarkan surat Nomor: UD.01.00/2/BAPPEBTI.2/ST.RAKOR/04/2024 terkait dengan kegiatan ilegal di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
7.	Bandung	Dalam Rangka Konsultasi Mengenai Persiapan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Dan Kenaikan Jenjang, Serta Permasalahan Pengangkatan Pangkat Dan Jabatan Fungsional Bagi Peserta Yang Sudah Lulus Ujian Kompetensi Tahun 2023
8.	Bandung	Menghadiri Undangan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melalui Surat Nomor: KP.12.04/865/SJ-DAG.10/UND/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 mengenai Rapat Persiapan Musyawarah Nasional Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
9.	Bandung	Menghadiri Undangan Sekretaris Bappebti melalui Surat Nomor: TU.03/437/BAPPEBTI.1/UND/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 mengenai Rapat Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas Bappebti
10.	Yogyakarta	Menghadiri kegiatan kunjungan kerja (benchmarking) ke unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang pernah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk bertukar pengalaman dan diskusi menangani Zona Integritas berdasarkan surat Sekretaris Bappebti Nomor: OT.00/465/BAPPEBTI.1/ND/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Kunjungan Kerja dalam rangka Evaluasi Zona Integritas Bappebti

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Anggaran tahun 2024 yang dialokasikan pada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan pada bulan Januari 2024 sebesar **Rp. 2.471.964.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat lima rupiah)**, dengan adanya **Refocusing anggaran pada bulan Februari 2024 pagu**

menjadi sebesar Rp. 1.920.003.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ribu rupiah). Secara rinci, anggaran dan realisasi Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.20:

**Tabel 2.20**  
**Realisasi Anggaran Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan**  
**s.d. Triwulan II Tahun 2024**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN REVISI	REALISASI ANGGARAN S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	(%) REALISASI
1.	Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Persentase Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang diuji Publik	391.161.000	215.802.642	55,16%
		Persentase Realisasi Pengenaan Sanksi atau Penindakan lebih lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Identifikasi, Pemeriksaan teknis, Pemeriksaan atau Penyidikan	1.188.377.000	469.016.666	39,46%
		Persentase Pemenuhan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	151.971.000	114.946.741	75,64%
		Persentase Pemenuhan Litigasi dan Penanganan Perselisihan	96.354.000	42.906.150	44,53%
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	92.140.000	-	-
<b>Total</b>			<b>1.920.003.000</b>	<b>842.672.199</b>	<b>43,89%</b>

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Dari tabel 2.20, dapat dilihat bahwa dari Rp. 1.920.003.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ribu rupiah) jumlah anggaran yang diberikan pada

tahun 2024, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2024 yaitu sebesar **Rp. 842.672.199,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 43,89% (empat puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen)** dari total anggaran keseluruhan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pelayanan, menyadari benar bahwa kinerja sektor peningkatan pelayanan hukum mengalami banyak tantangan. Termasuk tantangan dalam mengupayakan peningkatan sarana pelayanan hukum, hal-hal penunjang lain seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kinerja sektor pelayanan hukum.

Kerjasama antar unit organisasi dilingkungan internal Kementerian Perdagangan khususnya Bappebti dan antar instansi pemerintah lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang.

Dengan dibuatnya Laporan Kegiatan Triwulan II tahun 2024 diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja pelayanan hukum di awal tahun 2024 ini. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan laporan ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Demikian Laporan Kegiatan Triwulan II ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.